

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan sebuah alat pertanggungjawaban kinerja keuangan kepada publik.¹ Pemerintah daerah menjadikan laporan keuangan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus mempunyai manfaat bagi para pengguna, sehingga pemerintah harus benar-benar memperhatikan kualitas dari laporan keuangan.² Menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, informasi dalam laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan pemerintah daerah berarti pemerintah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, apabila informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut tidak memenuhi kriteria karakteristik kualitatif maka akan mengakibatkan kerugian serta ketidakefisien dan ketidakefektifan laporan keuangan daerah yang dihasilkan.³

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai setiap tahunnya oleh auditor eksternal pemerintahan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memberikan empat jenis opini terhadap laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah diantaranya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar

¹ Novtania Mokoginta dan Linda Lambey Winston Ponton, “Pengaruh Sistem Pendendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 2 (2017): 875.

² Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA, 2005).

³ Cris Kuntadi, dkk., “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Terapan* 3, no. 5 (2022): 458.

(TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).⁴ Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan wajar dan berkualitas apabila laporan tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kriteria opini atas kewajaran laporan keuangan adalah kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.⁵

Di Indonesia sendiri, kasus terkait buruknya kualitas laporan keuangan yang dilakukan pemerintah masih menjadi topik hangat yang perlu ditelaah lebih lanjut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya instansi pemerintah yang mendapat opini *disclaimer* serta banyaknya temuan audit yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.⁶ Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara telah mendapatkan opini WTP dari BPK atas LKPD. Meski memperoleh opini WTP dari BPK, tidak menjamin bahwa dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban laporan keuangan bebas dari kecurangan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya temuan permasalahan terkait lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Permasalahan tersebut antara lain penatausahaan dan pengelolaan aset tetap yang belum memadai, kekurangan

⁴ Novtania Mokoginta dan Linda Lambey Winston Ponton, "Pengaruh Sistem Pendendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 2 (2017): 874.

⁵ Dewi Indriarsih, "The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government," *Journal of Finance and Accounting* 5, no. 20 (2014): 38–39, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/viewFile/16989/17309>.

⁶ Azlim, dkk., "Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 1, no. 1 (2012): 2, <https://docplayer.info/31915083-Pengaruh-penerapan-good-governance-dan-standar-akuntansi-pemerintahan-terhadap-kualitas-informasi-keuangan-skpd-di-kota-banda-aceh.html>.

volume pekerjaan fisik, dan penatausahaan pendapatan retribusi yang tidak tertib.⁷

Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat membangkitkan kredibilitasnya dalam menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai sehingga bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.⁸ Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adanya penerapan SAP yang benar dan pemahaman yang baik terhadap keuangan pemerintah daerah tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.⁹ Suatu instansi akan membutuhkan sistem pengendalian internal yang kuat dan peran dari audit internal untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.¹⁰ Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan peran auditor internal.

Faktor yang pertama adalah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal berperan penting dalam meninggikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan sistem pengendalian internal mampu menaikkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian yang baik akan menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah yang

⁷ BPK, "BPK Perwakilan Provinsi Jateng Serahkan LHP Atas LKPD TA 2021 Kepada 11 Pemerintah Daerah," <https://jateng.bpk.go.id/category/siaran-pers/>.

⁸ Halmawati dan Wati Sri Nova Wati, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sijunjung)," *Jurnal WRA* 2, no. 2 (2014): 455.

⁹ Hamonangan Siallagan, "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Jurnal Akuntansi* 16, no. 2 (2022): 244.

¹⁰ M. Ali Fikri Biana Adha Inapty dan Sri Pancawati Martiningsih, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Dan Pern Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Jurna Ilhmu Akuntansi* 9, no. 1 (2016): 29.

tinggi.¹¹ Lingkungan pengendalian internal yang kurang mendukung menjadi penyebab utama turunnya kualitas laporan keuangan, sehingga pengendalian internal dapat dijadikan alat dalam mencapai pelaporan yang akurat.¹² Faktor yang kedua adalah pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP). Adanya keterbatasan sumberdaya manusia dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP menjadi hambatan dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Semakin baik pemahaman SAP maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.¹³ Selain kedua faktor tersebut terdapat faktor lain yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yaitu peran auditor internal. Audit internal adalah suatu fungsi yang berperan melakukan evaluasi dan mengawasi prosedur laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu instansi guna menilai efisiensi dan efektivitas pelaporan keuangan tersebut.¹⁴ Selain itu, audit internal juga dapat berfungsi sebagai pemberi jasa konsultasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.¹⁵

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian Nunuy Nur Afiah dan Peny Cahaya Azwari menyatakan bahwa penerapan sistem

¹¹ Ni Komang Ayu Mahartini, dkk., "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem," *Jurnal Karrma* 1, no. 4 (2021): 1126.

¹² Leinicke, dkk., "Quality Financial Reporting: Back to the Basics," *The CPA Journal* 70, no. 8 (2000): 6.

¹³ Heru Mulyadi Santosa, dkk., "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaat Sistem Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Se-Eks. Karisidenan Surakarta)," *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 16 (2020): 323.

¹⁴ M. Ali Fikri Biana Adha Inapty dan Sri Pancawati Martiningsih, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Dan Pern Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Jurnal Ilmu Akuntansi* 9, no. 1 (2016): 30.

¹⁵ Syafrida Yuliana, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)," *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi* 3, no. 2 (2010): 206–207.

pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.¹⁶ Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Heri Susanto, Eka Nurmala Sari, dan Maya Sari menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.¹⁷ Sejalan dengan penelitian Lailatur Rohmah, Noor Shodiq Askandar, dan Arista Fauzi Kartika Sari menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.¹⁸ Namun, pada penelitian Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, dan Muhyarsyah mengungkapkan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.²⁰ Berbeda dengan penelitian Diyah Atika, Listya Devi Junaidi, dan Allia Irmadhani menunjukkan peran audit

¹⁶ Nunuy Nur Afiah dan Peny Cahaya Azwari, "The Effect Of The Implementation Of Government Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance: A Research In District, City, And Provincial Government In Sout," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211, (2015): 816-817.

¹⁷ Heri Susanto, dkk., "Factors Affecting The Quality of Financial Reports In The Government of Langkat Regency," *BIRCI-Journal* 4, no. 4 (2021): 12264.

¹⁸ Lailatur Rohmah, dkk., "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang," *E-JRA* 9, no. 5 (2020): 43.

¹⁹ Ni Komang Ayu Mahartini, dkk., "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem," *Jurnal Karma* 1, no. 4 (2021): 1125.

²⁰ Siti Irafah, dkk., "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 2 (2020): 337.

internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.²¹

Beberapa penelitian terdahulu dengan variabel independen dan dependen yang sama menunjukkan hasil pengaruh yang berbeda, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat kembali penelitian dengan topik yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel peran auditor internal. Alasan pemilihan variabel karena variabel tersebut merupakan variabel yang jarang diteliti oleh peneliti sebelumnya dan merupakan variabel yang dianggap penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, terdapat juga perbedaan objek penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil objek di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara. Alasan mengambil objek di tiga kabupaten tersebut karena dalam laporan keuangan yang dihasilkan dari ketiga Kabupaten tersebut masih terdapat temuan permasalahan yang ditemukan oleh BPK terkait lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan belum dikatakan berkualitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang diprosikan dengan 3 variabel yaitu penerapan SPIP, pemahaman SAP, dan peran internal audit dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Kudus, Pati, Dan Jepara).**

²¹ Diyah Atika, dkk., “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja Serta Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan,” *Jurnal Warta* 13, no. 4 (2019): 77.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah ada pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah ada pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan mengenai penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan peran auditor internal di pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan peran auditor internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai evaluasi terkait pentingnya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan peran auditor internal serta sebagai bahan bertukar pikiran bagi pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah studi pustaka di bidang ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan karya ilmiah yang baik harus sesuai dengan sistematika penulisan yang teratur dan sistematis. Dengan demikian akan dapat memberikan efek kemudahan kepada pembaca untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data dengan uraian deskripsi teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian dari jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian,

identifikasi variabel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan uraian dari variabel penelitian yang dilakukan berupa gambaran obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi inti dari kesimpulan hasil analisis data, saran-saran, dan keterbatasan penelitian.

